

RUMUSAN
SEMINAR NASIONAL
PENGUATAN PERAN MASYARAKAT DAN SWASTA SEBAGAI MITRA
PEMERINTAH MENUJU INDONESIA BEBAS RABIES

Gedung Kusnoto, Bogor; Sabtu, 27 Februari 2016

Memperhatikan presentasi dari narasumber Drh. I Ketut Diarmita, MP (Direktur Kesehatan Hewan), Luuk Schoonman, DVM., PhD (FAO), Drh. Ni Made Restiati, MPhil (Ketua PDHI Bali), dan Drh. Tri Satya Putri Naispospos, MPhil., PhD (Ketua Badan Pengurus CIVAS) dan diskusi yang berlangsung, Seminar Nasional Penguatan Peran Masyarakat dan Swasta sebagai Mitra Pemerintah menuju Indonesia Bebas Rabies mencatat dan merekomendasikan sebagai berikut:

1. Dalam rangka mencapai target bebas rabies di Indonesia, **Peta Jalan (Road Map) Nasional Pembebasan Rabies** yang telah disusun Pemerintah merupakan kesepakatan bersama yang perlu diimplementasikan dengan komitmen yang kuat dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, serta masyarakat dan swasta sebagai mitra pemerintah.
2. Peta Jalan Nasional Pembebasan Rabies tersebut menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan strategi pemberantasan rabies melalui pendekatan status daerah (zona) dan pendekatan tahapan (*stepwise approach toward rabies elimination/SARE*). Strategi pembebasan rabies mencakup **vaksinasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), pengawasan lalu lintas, kontrol populasi dan surveilans**.
3. Target Indonesia bebas rabies tahun 2020 sesuai kesepakatan Menteri-Menteri Pertanian dan Menteri-Menteri Kesehatan se-ASEAN akan sulit untuk dicapai apabila tidak didukung dengan **pengelolaan program dan koordinasi teknis yang kuat di lapangan, termasuk penganggaran yang bersifat jangka panjang**, baik dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah, serta disinergikan dengan kontribusi masyarakat serta swasta (*share responsibility*).
4. FAO sebagai badan internasional telah memberikan dukungannya dalam bentuk bantuan teknis untuk program pengendalian dan pemberantasan rabies di Bali dan Flores-Lembata, Nusa Tenggara Timur. Strategi utama yang disarankan adalah vaksinasi anjing massal dengan cakupan 70% untuk mencapai kekebalan kelompok. **Eliminasi anjing secara sembarangan akan menjadi kontraproduktif** karena anjing yang telah divaksin mungkin saja terbunuh sehingga mengurangi kekebalan populasi, dan juga tidak dapat mengurangi kecepatan perkembangbiakan anjing.
5. Dalam implementasi program pengendalian dan pemberantasan rabies di Bali, khususnya vaksinasi massal rabies perlu adanya upaya optimalisasi sumberdaya dokter hewan di Bali yang jumlahnya cukup banyak. Optimalisasi tersebut dilakukan dengan menambah jumlah tim khusus penangkap anjing dan vaksinasi (*A Team*) di seluruh kabupaten dengan insiden tinggi, dan memperkuat kembali koordinasi vaksinasi.

6. Aspek kepemimpinan dalam program pengendalian dan pemberantasan rabies memegang peranan penting, mengingat diperlukan kemampuan untuk dapat menggerakkan semua lini dalam implementasi strategi dan koordinasi. Aspek kepemimpinan diperlukan baik dari pemerintah, swasta maupun masyarakat.
7. Pihak swasta (termasuk dokter hewan swasta, organisasi kesejahteraan hewan atau penyayang binatang, perusahaan, Lembaga Swadaya Masyarakat dlsbnya) perlu diikutsertakan dalam mensukseskan program pengendalian dan pemberantasan rabies sesuai kontribusinya masing-masing, baik dalam melakukan peningkatan kesadaran masyarakat melalui KIE, juga berperan dalam memberikan sumbangsih keahlian/keterampilan dalam implementasi program pelatihan atau membantu dalam pelaksanaan program, atau menyediakan data dan informasi melalui kajian/penelitian yang dapat mendukung penguatan strategi dan pengelolaan program dalam Peta Jalan Nasional Pembebasan Rabies.
8. Pelibatan dan pemberdayaan dokter hewan swasta dapat dilakukan melalui Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PHDI) terutama dalam hal vaksinasi di tempat praktek, KIE, sterilisasi, posko rabies, dan kandang monitoring suspek hewan penular rabies (HPR).
9. Pelibatan masyarakat dengan pembentukan kader rabies di tingkat desa yang tugasnya meregistrasi anjing, memantau anjing-anjing berkeliaran, membangun kesadaran masyarakat dan membantu dalam program vaksinasi massal menjadi saltu alternatif yang dapat diimplementasikan terutama di wilayah-wilayah endemis rabies yang jumlah dokter hewan dan paramedisnya sangat terbatas.

Tim Perumus:

1. **Drh. Pebi Purwo Suseno** (Ketua) | Anggota CIVAS & Staf Direktorat Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian
2. **Drh. Albertus Teguh Muljono** (Anggota) | Anggota CIVAS
3. **Drh. Imron Suandy, MVPH** (Anggota) | Anggota CIVAS & Staf Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian